

Kegiatan Pembahasan Dan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Tentang Sinergi Dan Pengelolaan Opsi Nasional Atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Pada hari Senin, 30 September dan Selasa, 1 Oktober 2024, bertempat di Aula Betang Swiss-Belhotel Palangka Raya, telah dilaksanakan kegiatan pembahasan dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Sinergi dan Pengelolaan Opsi Nasional atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kegiatan ini dibuka oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan paparan yang disampaikan oleh perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.

Dalam pembahasan tersebut, ditekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota, termasuk Kabupaten Barito Timur, dalam pengelolaan Opsi Nasional (Opsen) terkait PKB dan BBNKB. Sinergi ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengelolaan pajak kendaraan bermotor yang merupakan salah satu sumber pendapatan penting bagi daerah.

Pokok bahasan dalam pertemuan ini meliputi tata alur pengelolaan Opsen, mekanisme berbagi anggaran (sharing budget) antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta regulasi yang menjadi dasar hukum pengelolaan Opsen tersebut. Pengelolaan Opsen ini menjadi sangat krusial dalam kerangka pelaksanaan kebijakan desentralisasi fiskal, khususnya terkait pajak daerah yang memiliki kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Perjanjian Kerja Sama ini juga merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 tentang Opsi Nasional atas PKB dan BBNKB. Kedua regulasi ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengelolaan pajak daerah yang lebih terintegrasi, transparan, dan akuntabel. Hal ini juga membuka ruang bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak melalui pengelolaan Opsen.

Melalui sinergi pengaturan Opsen PKB dan BBNKB ini, diharapkan tercipta tata kelola pajak daerah yang lebih efisien, terukur, dan transparan, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan PAD. Mekanisme sharing budget yang proporsional antara Provinsi dan Kabupaten/Kota diharapkan dapat mendukung pemerataan pendapatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing daerah.

Pada kegiatan ini, Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur turut hadir dan didampingi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Timur beserta staf, Kepala Bagian Pemerintahan dan staf, serta perwakilan dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur. Kehadiran tim ini menunjukkan komitmen kuat Kabupaten Barito Timur dalam memastikan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan regulasi yang ada.

Penandatanganan PKS ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur dan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan disaksikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Kesepakatan ini menjadi bukti komitmen bersama untuk menjalankan pengelolaan Opsen PKB dan BBNKB secara sinergis, guna mendukung tata kelola pajak daerah yang lebih optimal dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat di Kalimantan Tengah.

Harapannya, dengan adanya PKS ini, kemandirian fiskal daerah dapat terus didorong melalui pengelolaan pajak yang lebih baik, terutama dalam sektor PKB dan BBNKB yang merupakan salah satu sumber pendapatan strategis bagi pemerintah daerah



Source of News and Picture : Bidang Pajak Daerah Bapenda Kab.Barito Timur